

Ethical Attitude of the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) Towards the 2024 Political Year in North Halmahera

Sikap Etis Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Menjelang Tahun Politik 2024 Di Halmahera Utara

Ramelia F. Dalensang

Universitas Halmahera, Maluku Utara, Indonesia

melidalensang@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to find out the ethical attitude of the Church to prevent the impact of election differences in political moments and to be involved in practical politics. This study employs a qualitative methodology utilizing a descriptive-analytic approach. According to the study's findings, the process of familiarizing the congregation with politics has been ongoing for a considerable period in the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) in North Maluku. However, the issue is that this socialization effort has yet to be successfully implemented among all congregation members. Another research finding about the Church's engagement in practical politics is that GMIH abstains from engaging in practical politics. The Church aims to foster a comprehensive comprehension of politics. It encourages all congregation members to exercise their rights to vote and run for office in the upcoming 2024 regional elections.*

Keywords: Church, Ethical Attitude, Politic.

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap etis Gereja untuk mencegah dampak perbedaan pemilihan dalam momen politik dan dapat terlibat dalam politik praktis. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, proses sosialisasi kepada jemaat untuk memberikan pemahaman yang baik kepada jemaat tentang politik, telah dilakukan sejak lama kepada jemaat, namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa kegiatan sosialisasi ini belum dapat dilaksanakan ke seluruh jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) yang ada di Maluku Utara. Hasil penelitian yang lain terkait keterlibatan Gereja dengan politik praktis adalah GMIH tidak terlibat dalam politik praktis. Gereja hadir untuk memberikan pemahaman politik yang baik, dan mengajak seluruh jemaat untuk memberikan haknya baik untuk memilih dan dipilih pada pemilu maupun pilukada tahun 2024.

Kata Kunci: Gereja, sikap etis, politik.

Article History:

Received: 20-10-2023

Revised: 25-06-2024

Accepted: 25-06-2024



1. Pendahuluan

Tahun 2024 merupakan tahun politik. Seluruh warga negara Indonesia, akan diperhadapkan dengan 2 (dua) peristiwa penting yakni: Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Konstestasi tersebut tentunya akan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk Gereja. Biasanya menjelang moment ini, isu yang hangat dibicarakan pada kalangan orang Kristen atau jemaat ialah tentang keterlibatan dan sikap Gereja dalam politik. Dapatkah Gereja berpolitik? Bagaimana sikap Gereja yang benar terhadap politik? Dapatkah pemimpin Gereja (Pendeta) mencalonkan diri? Pertanyaan-pertanyaan ini terkesan hendak memisahkan Gereja dan politik. Politik bukan urusan Gereja Gereja tidak boleh terlibat dalam politik. Pada umumnya pemahaman ini yang berkembang dalam kehidupan warga jemaat. Gereja sebagai organisasi sadar akan tugas dan panggilannya di tengah dunia. Gereja juga bagian dari politik, yang berdiri bukan untuk mengejar kekuasaan atau kepentingan politis dan ekonomis tertentu, melainkan yang dituntun oleh visi alkitabiah tentang masyarakat dan cara-cara berpolitik yang sehat, Gereja dapat berkontribusi dalam memberikan tawaran konsep yang lebih baik. Menurut Zakaria J. Ngelow¹ Menjelaskan bahwa Gereja terpanggil untuk melakukan transformasi dalam pola hidup secara pribadi manusia dan bermasyarakat.

Gereja dapat berfungsi dalam politik bukan untuk memainkan politik kekuasaan, melainkan Gereja berperan penting dalam membangun politik yang bermoral dan bermartabat sehingga dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Dikutip dalam Fransiska Ni Nyoman² dalam dunia politik dan hukum, Gereja mengambil sikap Gereja yang perlu dikembangkan adalah yang tetap mengambil sikap positif, dan kritis. Kata positif berarti Gereja tetap memandang politik sebagai tempat untuk pengabdian pelayanan dari Tuhan dan tetap berkontribusi sesuai dengan Iman Orang Kristen. Kritis artinya tidak segan-segan untuk memberikan masukan kepada pemimpin jika terjadi kekeliruan yang menyalahi aturan-aturan yang telah ada.³

Simamora dalam tulisannya menekankan bahwa Gereja sangat berperan penting, sebagai warga negara dalam mengawal roda pemerintahan. Gereja harus hadir jika di butuhkan untuk memberikan nasihat apabila dalam pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya dianggap melenceng dari aturan-aturan yang telah di tetapkan secara

¹ Zakaria J. Ngelow, "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia," *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 213-234.

² Fransiska Ni Nyoman, "Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen)," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2019).

³ Adolf Bastian Simamora, "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusran Politik Di Indonesia," *Jvow Vol 2 No 1 2*, no. 1 (2018).

sah. Dikutip dalam Alter I. Wowor⁴ menjelaskan bahwa pada dasarnya, politik merupakan suatu proses untuk mencapai kebaikan bersama. Politik juga merupakan bagian integral dari tugas yang telah diamanatkan Allah kepada manusia, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan prinsip Gereja yang memahami bahwa kehadirannya di dalam sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia. Dasar inilah yang menjadi sikap dan pelayanan Gereja. Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk membahas mengenai sikap etis Gereja untuk mencegah dampak perbedaan pemilihan dalam momen politik dan apakah Gereja dapat ikut terlibat dalam politik praktis.

Yang menjadi kajian terdahulu dalam penelitian ini seperti penelitian dari Johan Andres Serhalawan⁵ dengan judul sikap etis politik Gereja menyongsong tahun politik di Indonesia. Di dalam penelitian ini yang menitikberatkan pada sikap etis Gereja dalam bidang politik. Gereja dan politik tidak saling bertentangan justru sebaliknya. Gereja bagian dari politik. Gereja perlu bersikap etis dalam kancah politik. Penelitian sebelumnya juga dari Wowor⁶ dengan judul teologi dan etika politik dalam Gereja di zaman post-moder; penelitian ini membahas tentang realitas demokrasi di Indonesia pada zaman post-modern. Demokrasi yang seharusnya bertujuan untuk menjawab kepentingan-kepentingan rakyat tidak lagi diakui dan menjadi prioritas, yang diprioritaskan hanyalah kepentingan-kepentingan subjektif perorangan atau persekutuan tertentu. Dengan demikian, Gereja yang juga merupakan bagian dari persekutuan hidup perlu mengambil sikap etis. Sikap etis Gereja memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat secara holistik bukan perorangan. Gereja menjadi sarana komunikatif, yang mampu mengkomunikasikan kepada negara atau pemerintah, karena kehadiran Gereja diyakini dapat membawa pengaruh dalam pengambilan keputusan politik dan perubahan sosial. Penelitian terdahulu yang ketiga ini dari Alvary Exan Rerung and Juliati Attu⁷ dengan judul sikap Gereja terhadap partisipasi politik dan relevansinya bagi Gereja toraja mamasa jemat sapankale, tujuan dalam penelitian ini yaitu memberikan pemahaman tentang sikap Gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan benar, agar Gereja bisa secara aktif menyatakan suara kenabiannya dengan ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Jika ditelaah lebih jauh, penelitian pertama

⁴ Alter I Wowor, "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern," *BIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 112–123.

⁵ Johan Andres Serhalawan, "Sikap Etis Politis Gereja Menyongsong Tahun Politik di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Tangkole XV*, no. 1 (2018): 76–95.

⁶ Wowor, "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern."

⁷ Alvary Exan Rerung and Juliati Attu, "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale," *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (2023): 1–17.

memperlihatkan sikap etis Gereja dalam kancah politik. Gereja dalam hal ini memberikan dukungan bagi warganya untuk mendukung setiap proses dan perkembangan politik; Gereja harus berdiri untuk memperjuangkan kepentingan umat dan tidak ada keberpihakan. Sedangkan untuk peneltiain kedua di atas, realitas demokrasi pada zaman post-modern menuntut Gereja untuk bersikap etis. Sikap etis Gereja ini nampak pada peran Gereja sebagai sarana komunikatif yang mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat kepada negara atau pemerintah. Penelitian pada poin ketiga lebih fokus pada bagaimana Gereja dapat berperan aktif memberikan pemahaman tentang sikap Gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan benar jemaat. Hal ini membantu warga Gereja dalam berpartisipasi terhadap kegiatan berpolitik, agar tidak menimbulkan masalah disharmoni hingga perpecahan Gereja. Dari ketiga penelitian terdahulu di atas tidak membahas tentang sikap etis yang harus dilakukan Gereja untuk mencegah dampak perbedaan pemilihan dalam momen politik yang berujung pada perpecahan Gereja.

2. Metode Penelitian

Dalam kajian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hal ini dimaksudkan untuk memahami keterlibatan Gereja dalam momen politik dan sikap etis Gereja untuk mencegah dampak perbedaan pemilihan di kalangan warga jemaat dan melihat apakah Gereja Dapat Ikut terlibat dalam politik praktis pada momen politik di Halmahera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan menganalisis fakta-fakta terkait dengan keterlibatan dan sikap etis Gereja pada momen politik dalam mencegah dampak perbedaan pemilihan di kalangan warga jemaat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian di dapat melalui wawancara dengan informan. Di dalam penelitian ini informan ditentukan sejak awal penelitian dengan menggunakan teknik penentuan informan yaitu *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini dilakukan dengan tujuan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan berkompeten dengan masalah penelitian.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

Sikap Etis Gereja Untuk Mencegah Dampak Perbedaan Pemilihan Dalam Momen Politik

Warga Gereja yang baik tidak terlepas dari pada tanggung jawab politik yaitu ikut terlibat dalam memilih dan dipilih pada setiap momentum pesta demokrasi. Tujuan dari partisipasi aktif tersebut yaitu untuk membangun masa depan bangsa dan negara ke arah

⁸ Mikhael Rajamuda Bataona and Atwar Bajari, "Power Relation and Symbols of Political-Economy of the Church in Local Political Contestation of East Nusa," *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 2 (2017): 121–135.

yang lebih baik. Dikutip dalam Alexander Jebadu,⁹ Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia dari kodratnya adalah makhluk politis (*political animals*), karena politik dalam kehidupan manusia merupakan suatu hal penting. Kehidupan manusia tidak terlepas dari keadaan bahwa setiap manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan sesama manusia memerlukan bantuan orang lain untuk melanjutkan hidupnya. Kata politik disederhanakan oleh Yohanes K. Susanta dalam Grets Janialdi Apner¹⁰ menjelaskan bahwa politik selayaknya dipahami sebagai media untuk memperjuangkan kasih dan mewujudkan keadilan. Tujuan dari politik dari Susanta adalah untuk memperjuangkan kasih dan adanya keadilan bagi sesama. Pada prinsipnya politik merupakan suatu seni untuk bagaimana kita harus hidup bersama pada suatu kelompok dan semua ketentuannya diatur dalam suatu system bernegara. Pengertian politik dikemukakan oleh Emanuel Gerrit Singgih dalam David Ming¹¹ ialah politik sebagai seni untuk sebuah pengambilan keputusan dari orang-orang yang memiliki perbedaan dalam kepentingan, dengan tujuan yaitu mengambil sebuah kebijakan terkait dengan masa depan orang banyak. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Susanta di atas, melalui dengan politik, masyarakat dapat membuat suatu kebijakan yang baik untuk masa depan banyak orang. Tugas Gereja

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa saat ini, menjelang momen politik 2024 Gereja Masehi Injili di Halmahera telah memulai untuk mencegah dampak negatif dari yang akan terjadi. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan di jemaat untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut adalah dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada warga jemaat tentang politik di setiap kesempatan kegiatan berGereja. Kegiatan lain juga yang telah dilakukan oleh adalah melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada jemaat di seluruh wilayah GMIH di Maluku Utara. Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Wowor¹² bahwa Pada dasarnya, politik merupakan suatu proses untuk mencapai kebaikan bersama. Politik juga merupakan bagian integral dari tugas yang telah diamanatkan Allah kepada manusia, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan prinsip Gereja yang memahami bahwa kehadirannya di dalam sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia. Dasar inilah yang menjadi sikap dan pelayanan Gereja. Sejalan dengan apa

⁹ Alexander Jebadu, "Pemeliharaan Alam Ciptaan," *Jurnal Teologi* 06, no. 02 (2017): 167–186.

¹⁰ Grets Janialdi Apner, "Berdampak Dengan Moralitas: Sebuah Tawaran Peran Misional Dalam Politik Praktis Di Indonesia," *Jurnal Teologi Cultivation* 6, no. 1 (2022): 1–22.

¹¹ David Ming and David Ming, "Pemerintahan Yang Baik di Indonesia," *JURNAL KADESI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2021).

¹² Wowor, "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja di Zaman Post-Modern."

yang telah dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muh. Wahyu¹³ bahwa dengan demikian Gereja dan politik memiliki tanggung jawab dan tujuan yang sama, yakni untuk kebaikan umat. Abu Bakar dengan tegas menjelaskan bahwa Gereja tidak dapat lepas dari tanggungjawab sosialnya, salah satunya melalui peran aktif dalam dunia politik tanpa menunjukkan keberpihakan pada oknum tertentu, atau kelompok tertentu. Di dalam tulisannya Simamora¹⁴ mengemukakan bahwa politik sejak lama dianggap sebagai suatu hal yang tabu, sehingga hal ini perlu dihindari. Paulus dalam Roma 13:1-7 menjelaskan sebagai umat yang percaya pada Tuhan seharusnya melayani dunia dengan baik, bukan menjauhinya/merusaknya ketika mengalami masalah. Dalam hal pelayanan Gereja kepada jemaatnya, perlu memberikan pemahaman serta penguatan terhadap umat, termasuk dalam memberikan pemahaman tentang politik yang baik sehingga sebagai warga Gereja yang baik dapat memahami tugasnya dengan secara baik. Pendapat yang sama juga yang dikemukakan oleh Nyoman.¹⁵ Kajian dari Baghi dalam Bakar dan Wahyu¹⁶ menjelaskan bahwa Gereja sangat berperan penting dalam proses sosial politik untuk kepentingan banyak orang. Baghi, juga menyampaikan bahwa Gereja tidak boleh berada di luar pusran politik, karena Gereja harus terlibat dalam setiap proses demokrasi untuk mewujudkan setiap kebijakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan banyak orang.

Berdasarkan data-data di atas, penulis perlu untuk menjawab pertanyaan, bagaimana Gereja dapat mencegah dampak setelah pemilu? penulis memiliki tawaran dan posisi bahwa Gereja terlibat aktif namun perlu mengetahui batasannya. Kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu perlu dihidupi oleh Gereja; pun juga Gereja memberikan edukasi tentang pentingnya pemilihan umum yang akan sedang berjalan. Namun demikian, Gereja perlu menyadari akan adanya konflik kepentingan ketika Gereja melakukan edukasi; sehingga dengan mempertimbangkan berbagai hal, Gereja perlu dapat memberikan edukasi senetral mungkin demi kepuasan seluruh jemaat dan terlaksananya tujuan dalam edukasi pemilu. Tujuan akhirnya adalah menyampaikan bahwa politik bukan alat untuk kekuasaan, tetapi sarana untuk memberikan keadilan bagi seluruh makhluk.

Apakah Gereja Dapat Ikut terlibat dalam Politik Praktis?

¹³ Abu Bakar and Muh. Wahyu, "Gereja Dan Partisipasi Politik," *Vox Populi* 5, no. 1 (2022): 61–69.

¹⁴ Simamora, "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia."

¹⁵ Nyoman, "Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen)."

¹⁶ Bakar and Wahyu, "Gereja Dan Partisipasi Politik."

Keterlibatan Gereja dalam politik merupakan pembahasan yang menarik dibincangkan di Indonesia. Setiap momen politik baik itu pemilu maupun pilkada banyak warga jemaat mempertanyakan bagaimana sikap yang harus diambil oleh Gereja dalam setiap pesta demokrasi baik itu Pemilu maupun pilkada.

Pertanyaan yang sering muncul di jemaat akhir-akhir ini menjelang tahun politik 2024 adalah apakah Gereja dapat terlibat pada setiap momen politik di Indonesia? Berdasarkan hasil penelitian di Gereja Masehi Injili di Halmahera dapat dijelaskan bahwa Gereja tidak ikut terlibat dalam politik praktis, namun Gereja memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman politik yang baik kepada seluruh warga jemaat serta Gereja mengarahkan jemaat untuk dapat memberikan hak suaranya untuk dapat memilih pemimpin-pemimpin baru yang baik. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Gereja Masehi Injili di Halmahera tidak ikut serta dalam berpolitik, tetapi Gereja mengajak seluruh jemaat untuk dapat terlibat dalam memilih dan dipilih pada setiap tahun-tahun politik di Kabupaten Halmahera Utara. Negara menjamin setiap hak Rakyatnya baik untuk memilih dan pilih dalam setiap momen politik. Dikutip dalam Rian Scipto¹⁷ bahwa sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Tahun 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penekanan dalam Undang-undang dasar adalah Rakyatlah yang menjadi penentu siapa yang akan menjadi pemimpin bagi negara dan daerah ini untuk lima tahun kedepannya. Tugas Gereja di dalam tulisan Nyoman¹⁸ menjelaskan bahwa untuk memberikan bimbingan pastoral, terlibat untuk terselenggaranya satu kehidupan dalam menjalankan politik yang baik, memberikan rasa keadilan bagi semua warga negara, dan mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Tidak hanya itu, Gereja pun membuka diri, dinamis, dan dialogis dalam setiap situasi perkembangan yang terjadi di dalam jemaat dan masyarakat serta dapat menyikapi semua hal itu dengan sikap positif, kritis, kreatif, dan realistis. Pandangan terkait dengan bagaimana Gereja harus hadir bagi negara adalah Gereja terpanggil untuk melakukan transformasi dalam pola hidup secara pribadi manusia dan bermasyarakat. Gereja dapat berfungsi dalam politik bukan untuk memaikan politik kekuasaan, melainkan Gereja berperan penting dalam membangun politik yang bermoral dan bermartabat sehingga dapat membangun Indonesia yang lebih baik.¹⁹ Menurut Oscar Cullman dikutip dalam Ming,²⁰ terdapat perbedaan antara antara

¹⁷ Rian Scipto, “Tinjauan Wawasan Kaum Milineal Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi,” *Adil Indonesia Jurnal* 1, no. 1 (2019): 62.

¹⁸ Nyoman, “Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen).”

¹⁹ Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia.”

²⁰ Ming and Ming, “Pemerintahan Yang Baik di Indonesia.”

politeia dan *politeuma*. *Politeia* berarti politik dalam arti mengambil kekuasaan di dalam suatu sistem pemerintahan. *Politeuma* itu sendiri adalah politik yang menekankan tegaknya nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini misalnya: keadilan, kebenaran, kesejahteraan, dan mewujudkan dunia baru yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26-28).²¹ Cullman menyampaikan dalam kajiannya bahwa Gereja harus menegakkan kebenaran di tengah kehidupan politik yaitu menegakkan keadilan dan mewujudkan kasih berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Seharusnya, politik yang dijalankan oleh negara diarahkan dan diwujudkan berdasarkan kasih kepada sesama dan kepada Allah. Keberadaan Gereja Masehi Injili di Halmahera harus menjadikan satu bentuk tindakan nyata dalam politik. Tawaran penulis adalah politik merupakan satu bagian ladang pelayanan yang harus dilayani Gereja.

Lebih jauh dikemukakan oleh Simamora²² dalam tulisannya menekankan bahwa Gereja sangat berperan penting, untuk mengawal roda pemerintahan, jika Negara dalam menjalankan tugasnya melenceng dari pada aturan-aturan yang ada maka Gereja harus hadir untuk memberikan masukan kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Simamora dalam konsepnya menjelaskan bahwa Gereja hadir untuk mengingatkan kepada Negara, apabila dalam menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi dan UUD 1945.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jauh hari sebelum menjelang Pemilu dan Pilukada di tahun 2024 mendatang, Gereja Masehi Injili di Halmahera telah memberikan sosialisasi ke jemaat-jemaat untuk memberikan pemahaman politik yang baik kepada jemaat, namun yang menjadi hambatan bahwa kegiatan sosialisasi ini belum dapat dilaksanakan ke seluruh jemaat GMIH di Maluku Utara. Hasil penelitian yang lain terkait dengan apakah Gereja dapat terlibat dalam politik praktis, Gereja Masehi Injili di Halmahera tidak terlibat dalam politik praktis, namun Gereja hadir untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jemaat untuk memberikan pemahaman politik yang baik, dan mengajak seluruh jemaat untuk memberikan haknya baik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu maupun pilkada.

²¹ Nyoman, "Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen)."

²² Simamora, "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia."

5. Ucapan Terima Kasih

Terimah kasih kepada Kemenristekdikti melalui LLDIKTI Wilayah XII yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga telah memberikan Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun anggaran 2023.

Referensi

- Apner, Grets Janialdi. "Berdampak Dengan Moralitas: Sebuah Tawaran Peran Misional Dalam Politik Praktis Di Indonesia." *Jurnal Teologi Cultivation* 6, no. 1 (2022): 1–22.
- Bakar, Abu, and Muh. Wahyu. "Gereja Dan Partisipasi Politik." *Vox Populi* 5, no. 1 (2022): 61–69.
- Bataona, Mikhael Rajamuda, and Atwar Bajari. "Power Relation and Symbols of Political-Economy of the Church in Local Political Contestation of East Nusa." *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 2 (2017): 121–135.
- Jebadu, Alexander. "Pemeliharaan Alam Ciptaan." *Jurnal Teologi* 06, no. 02 (2017): 167–186.
- Ming, David, and David Ming. "Pemerintahan Yang Baik di Indonesia." *Jurnal Kadesi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2021).
- Ngelow, Zakaria J. "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia." *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 213–234.
- Nyoman, Fransiska Ni. "Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen)." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2019).
- Rerung, Alvary Exan, and Juliati Attu. "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale." *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (2023): 1–17.
- Scipto, Rian. "Tinjauan Wawasan Kaum Milineal Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi." *Adil Indonesia Jurnal* 1, no. 1 (2019): 62.
- Serhalawan, Johan Andres. "Sikap Etis Politis Gereja Menyongsong Tahun Politik di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Tangkole* XV, no. 1 (2018): 76–95.
- Simamora, Adolf Bastian. "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia." *Jvow Vol 2 No 1 2*, no. 1 (2018).
- Wowor, Alter I. "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern." *BIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 112–123.